

ABSTRAK

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan fungsi tersebut, di dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan menganalisis sumber-sumber data baik primer atau sekunder.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sumberahayu Kabupaten Kendal sudah baik dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menjalankan fungsinya secara efektif dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberahayu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berlaku serta terbatasnya biaya operasional untuk mendukung kegiatan BPD.

Kata Kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sumberahayu

ABSTRACT

Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies, Article 31 of the BPD states that it has the function of discussing and agreeing on Draft Village Regulations with the Village Head, accommodating and channeling the aspirations of the Village community; and supervising the performance of the Village Head. Based on this function, in the implementation of Village Government, BPD has a very important role because it is a forum for accommodating and channeling community aspirations, so it can be said that the success of the Village can be seen from how effective the BPD's role is in carrying out its functions. The purpose of this research is to determine the implementation of the main duties and functions of the Village Consultative Body (BPD) in administering Village government and the factors that influence the implementation of the main duties and functions (BPD) in administering Village government.

The approach method used in this research is normative juridical research type. The specifications used in this research are descriptive research specifications. The data collection methods used in this research are library research and field research. In this research, data analysis was carried out qualitatively, namely by analyzing data sources, both primary and secondary.

The results of the research state that the implementation of the functions of the BPD in Sumberahayu Village, Kendal Regency is good in carrying out its duties in accordance with applicable regulations, such as Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies. The Village Consultative Body (BPD) has carried out its function effectively in establishing Village Regulations together with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations, and supervising the performance of the Village Head. Factors that hinder the implementation of the functions of the Sumberahayu Village Consultative Body (BPD) in administering village government include a lack of understanding of applicable regulations and limited operational costs to support BPD activities.

Keywords: Function, Village Consultative Body, Sumberahayu Village